

PERPUSTAKAAN

BALAI POKOK BUDIDAYA PERIKANAN
JL. LAKSMA NATA 13 & 14 KEMANGKASAN
JAKARTA BARAT 10110

**PEDOMAN
PENYUSUNAN PROGRAM
PENYULUHAN PERTANIAN
DAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN**

63



**DEPARTEMEN PERTANIAN
1985**

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pedoman Penyusunan PPPP disusun dengan mengambil pokok-pikiran yang dirumuskan dalam Lokakarya Penyusunan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kuningan, Jawa Barat tahun 1984, yang kemudian diadakan pembahasan-pembahasan dengan terbitnya Pedoman ini.

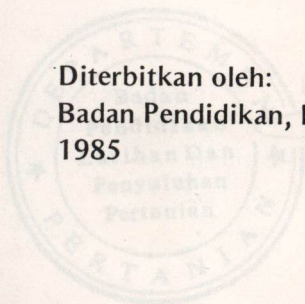
Berkaitannya Pedoman ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas yang bersangkutan dalam menyusun rencana penyuluhan pertanian dengan lebih terarah dan baik sebagai upaya mewujudkan kegiatan gerak dalam pengendalian, bimbingan maupun pengelolaan penyuluhan pertanian, untuk tercapainya efisiensi aktivitas dalam penggunaan dana, daya dan waktu. Untuk itu diharapkan semua yang berguna bagi penyusunan Pedoman ini diperhatikan.

Salui kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga buku ini dapat terbit.

Jakarta, Juni 1985

Diterbitkan oleh:

Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian
1985



Artian Mokhammad
NIP: 080024622

PEDOMAN
PENYUSUNAN PROGRAM
PENYULUHAN PERTANIAN
DAN
PROGRAM PENYELENGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN

Diterbitkan oleh:
Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian
1982



PRAKATA

Sejak keluarnya Buku Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat BPP tahun 1979, buku ini telah beberapa kali mengalami perbaikan. Dan sejalan dengan perkembangan serta kebutuhan di tingkat lapangan, dirasa perlu untuk menerbitkan kembali. Kali ini selain Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat BPP, juga diterbitkan Pedoman Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten (PPPP). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemakai dalam memahami keterkaitan antara program yang disusun di tingkat BPP dengan di Kabupaten serta menjadikannya alat kerja yang praktis.

Pedoman Penyusunan PPPP disusun dengan mengambil pokok-pokok pikiran yang dirumuskan dalam Lokakarya Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kuningan, Jawa Barat tahun 1984, yang kemudian diadakan pembahasan-pembahasan sampai dengan terbitnya Pedoman ini.

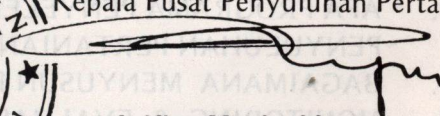
Diterbitkannya Pedoman ini dimaksudkan untuk melengkapi para petugas yang bersangkutan dalam menyusun rencana penyuluhan pertanian dengan lebih terarah dan baik sebagai upaya mewujudkan satu kesatuan gerak dalam pengendalian, bimbingan maupun penyelenggaraan penyuluhan pertanian, untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, daya dan waktu. Umpan balik berupa apapun yang berguna bagi penyempurnaan Pedoman ini akan diperhatikan.

Melalui kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga buku ini dapat diterbitkan.



Jakarta, Juni 1985

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,


Arifien Moekaddas

NIP: 080024522

DAFTAR ISI

	Hal.
PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN DI TINGKAT BPP	iii
 BAB. I. PENGERTIAN	
A. Keadaan	1
B. Tujuan	2
C. Masalah	2
D. Cara Mencapai Tujuan	3
 BAB. II. TAHAPAN PENYUSUNAN SUATU PROGRAM	
A. Tahap I : Perumusan Keadaan	4
B. Tahap II : Penetapan Tujuan	6
C. Tahap III : Penetapan Masalah yang mungkin dihadapi	7
D. Tahap IV : Penetapan Cara Mencapai Tujuan	8
 BAB. III. CARA PENYUSUNAN SUATU PROGRAM	
A. Prosedur Penyusunan Suatu Program	10
B. Langkah-langkah Penyusunan Suatu Program	11
 PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYELENG- GARAAN PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN	15
I. PENDAHULUAN	17
II. APA PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN (PPPP) ITU ?	19
III. BAGAIMANA MENYUSUN PPPP	23
IV. MONITORING & EVALUASI PPPP	25
V. PENUTUP	25

bab I. pengertian

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN di tingkat BPP

A. KEADAAN

Keadaan disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis sebagai hasil dari analisa data dan informasi yang telah terkumpul. Data dan informasi yang diperoleh bagi perumusan keadaan bersumber dari:

- a. Data wilayah kerja, yaitu data dan informasi WK/BPP yang bersangkutan yang berkaitan dengan program.
- b. Kebijakan Pemerintah, yaitu data dan informasi mengenai rencana kegiatan operasional pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP yang bersangkutan untuk tahun pelaksanaan program serta rekomendasi teknologi yang ditetapkan.
- c. Petani-Nelayan dan Usahatani-nelayannya, yaitu data dan informasi tentang petani-nelayan beserta keluarganya dan penerapan teknologi dalam usaha tani-nelayannya.

Data tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mutakhir, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan tidak kadaluarsa (1 atau 2 tahun terakhir).

bab I. pengertian

Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian untuk wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang dibuat setiap tahun sekali. Rencana kegiatan penyuluhan pertanian tersebut berisikan unsur-unsur KEADAAN, TUJUAN, MASALAH dan CARA MENCAPAI TUJUAN yang disusun secara sistematis dan tertulis.

Dari uraian pengertian tersebut di atas terdapat 4 unsur yang perlu diperhatikan yaitu keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan.

A. KEADAAN

Keadaan disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis sebagai hasil dari analisa data dan informasi yang telah terkumpul. Data dan informasi yang diperoleh bagi perumusan keadaan bersumber dari:

- a. Data wilayah kerja, yaitu data dan informasi WKBPP yang bersangkutan yang berkaitan dengan program.
- b. Kebijakan Pemerintah, yaitu data dan informasi mengenai rencana kegiatan operasional pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP yang bersangkutan untuk tahun pelaksanaan program serta rekomendasi teknologi yang ditetapkan.
- c. Petani-Nelayan dan Usahatani-nelayannya, yaitu data dan informasi tentang petani-nelayan beserta keluarganya dan penerapan teknologi dalam usaha tani-nelayannya.

Data tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mutakhir, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan tidak kadaluarsa (1 atau 2 tahun terakhir).

- b. Katagoris, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan hanya mengemukakan yang umum, tapi juga data dan informasi yang spesifik yang memperlihatkan penggolongan perbedaan keadaan.
- c. Akurat, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan c teliti dan dapat dipercaya.
- d. Komprehensif, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan harus lengkap serta saling menunjang dan berkesatu sama lain.

Pengumpulan data dan informasi tersebut merupakan kegiatan persiapan penyusunan program, yang dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum program disusun.

B. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang perubahan yang hendak dicapai. Tujuan ditetapkan berdasarkan keadaan yang telah ada, musun serta diselaraskan dengan keinginan dan kepentingan petani-nelayan beserta keluarganya. Tujuan dirumuskan sehingga menggambarkan perubahan perilaku petani-nelayan dan keluarganya yang hendak dicapai.

C. MASALAH

Masalah adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan tercapainya tujuan. Faktor-faktor penyebab itu ada yang sifat perilaku dan ada juga yang bersifat bukan perilaku. sekian banyak masalah yang ditetapkan, kemudian disortir prioritasnya. Cara penetapan prioritas didasarkan pada:

- a. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para petani-nelayan.
- b. Apakah erat kaitannya dengan program pembangunan pertanian yang sedang berlangsung di Wilayah Kerja B.
- c. Apakah kemampuan (biaya, tenaga, peralatan dll.) tersedia untuk pemecahan masalah.

Penetapan urutan prioritas masalah dapat juga dilakukan dengan jalan menggunakan teknik penetapan faktor penentu (impact point) *).

D. CARA MENCAPAI TUJUAN

Cara mencapai tujuan adalah acara kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai.

Untuk merumuskan cara mencapai tujuan perlu diperhatikan:

- a. Tingkat kemampuan penyuluh;
- b. Tingkat kemampuan petani-nelayan dan keluarganya;
- c. Sarana dan prasarana penyuluh pertanian;
- d. Situasi lingkungan tempat kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan;
- e. Sarana dan prasarana usahatani.



Hubungan serasi antara penyuluh dan petani adalah kunci keberhasilan penyuluhan.

*) Keterangan lebih terperinci dapat dilihat pada buku petunjuk penetapan faktor penentu/impact point (NAEP).

bab II.

tahapan penyusunan suatu programa

Sesuai dengan rumusan pengertian Programa Penyuluhan Pertanian, maka tahapan penyusunan suatu programa dapat dibagi atas 4 tahap yang urutannya sebagai berikut:

Tahap (I) : PERUMUSAN KEADAAN

Tahap (II) : PENETAPAN TUJUAN

Tahap (III) : PENETAPAN MASALAH YANG MUNGKIN DIHADAPI

Tahap (IV) : PENETAPAN CARA MENCAPAI TUJUAN.

A. Tahap I : PERUMUSAN KEADAAN

Sebelum keadaan dirumuskan perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi dasar yang meliputi wilayah kerja BPP, kebijaksanaan pemerintah dan petani-nelayan beserta keluarganya serta usahatani-nelayannya.

1. Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Kerja.

Data yang dikumpulkan berupa data dasar yang menggambarkan secara umum potensi dari berbagai sub-sektor lingkup pertanian yang ada di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) yang erat kaitannya dengan programa.

Data tersebut merupakan data sekunder dari masing-masing Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) yang ada di WKBPP.

Data bisa diperoleh dari para petugas lingkup pertanian, kantor desa/LKMD atau instansi lain.

2. Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah.

Data dan Informasi yang diperlukan berupa rencana kegiatan operasional pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP yang bersangkutan untuk tahun pelaksanaan program serta rekomendasi-rekomendasi teknologi yang dianjurkan. Dari data dan informasi tersebut maka akan diperoleh petunjuk usahatani-nelayan apa yang harus dikembangkan serta rekomendasi teknologi apa yang harus disampaikan atau diajarkan kepada petani-nelayan dan keluarganya.

Data dan informasi kebijakan pemerintah ini diperoleh dari Kepala Dinas-Kepala Dinas lingkup pertanian tingkat kabupaten & instansi lain serta dari Camat dan Kepala Desa/LKMD yang berada di wilayah kerja BPP. Dengan demikian maka kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan di wilayah kerja BPP benar-benar mendukung program pembangunan pertanian.

3. Pengumpulan Data dan Informasi Petani-Nelayan dan Usahatani-Nelayannya.

Data dan informasi yang dikumpulkan terutama mengenai penerapan teknologi dalam usahatani-nelayan serta alasan-alasannya.

Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dengan jalan wawancara langsung dengan petani-nelayan dan keluarganya dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Jenis kuesioner yang dibuat disesuaikan dengan jenis usahatani-nelayan yang akan dikembangkan di wilayah kerja BPP yang bersangkutan.

Jumlah dan jenis responden yang akan diwawancarai disesuaikan dengan data dan informasi yang dibutuhkan, jumlah KK-Tani-Nelayan dan keluarganya serta dengan mempertimbangkan pula biaya dan tenaga-tenaga yang tersedia untuk pengumpulan data tersebut. Pernyataan keadaan dirumuskan

sedemikian rupa sehingga terutama menggambarkan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap petani-nelayan beserta keluarganya dalam penerapan teknologi usahatani-nelayan beserta keluarganya dalam penerapan teknologi di usahatani-nelayannya dan hasil yang dicapai.



Dengan demikian keadaan selalu menggambarkan hubungan antara petani-nelayan dengan kegiatannya, lingkungan usahatani-nelayan serta hasil-hasil yang dicapainya pada saat itu.

B. Tahap II : PENETAPAN TUJUAN

Yang dimaksud dengan Penetapan Tujuan adalah perumusan tujuan penyuluhan pertanian yang hendak dicapai dalam jangka



waktu satu tahun. Tujuan penyuluhan pertanian dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan perubahan perilaku petani-nelayan dan keluarganya yang hendak dicapai.

Penetapan tujuan tersebut dilakukan bersama antara pemerintah dan petani sehingga rumusan tujuan tersebut menggambarkan keinginan dan kepentingan dari kedua belah pihak.

C. Tahap III : PENETAPAN MASALAH YANG MUNGKIN DIHADAPI

Setelah tujuan ditetapkan maka tahapan berikutnya adalah penetapan masalah yang mungkin dihadapi. Masalah-masalah ini berupa faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan.

Faktor-faktor tersebut terutama dicari dari kemampuan petani-nelayan dan keluarganya dalam mencapai tujuan tersebut.

Faktor-faktor penyebab tersebut disusun prioritasnya berdasarkan pada:

1. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas petani-nelayan.
2. Apakah erat kaitannya dengan program pembangunan pertanian yang sedang berlangsung di wilayah kerja BPP.
3. Apakah kemampuan (biaya tenaga, peralatan, dsb) tersedia untuk pemecahan masalah.



Apabila petunjuk penggunaan impact point-nya sudah ada, maka urutan prioritas masalah dapat dilakukan dengan menggunakan teknik faktor penentu (impact-point).

D. Tahap IV : PENETAPAN CARA MENCAPAI TUJUAN

Tahap terakhir adalah tahap penetapan cara mencapai yaitu penetapan acara kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai.

Ada 2 buah acara yang harus disusun yaitu:

1. Acara kegiatan penyuluhan yang meliputi data dan informasi mengenai sasaran, lokasi, metoda, waktu dan biaya. Yang dicantumkan sebagai masalah dalam acara kegiatan penyuluhan di sini adalah masalah-masalah petani-nelayan yang bersifat perilaku, yang antara lain bisa disidik (diidentifikasi) berdasarkan teknik faktor penentu.

2. Acara kegiatan membantu mengikhtiarkan pelayanan pengaturan yang meliputi data dan informasi mengenai masalah, lokasi, ikhtiar yang dilakukan, petugas, waktu dan keterangannya.

Yang dicantumkan sebagai masalah di sini adalah masalah petani yang bersifat non-perilaku antara lain masalah peternakan, sarana dan prasarana usahatani dan kemasyarakatan penyuluh, tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan dan situasi tempat kegiatan penyuluhan itu berlangsung.



Untuk memudahkan pelaksanaan cara mencapai tujuan maka dibuat daftar:

1. Acara Kegiatan penyuluhan pertanian yang berisi sbb.:

No.	Tujuan	Masalah		Lokasi	Sasaran	Metode		Waktu	Biaya		Petugas
		Impact Point	Perilaku			Je-nis	Vol		Rp.	Sum-ber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Acara kegiatan membantu mengikhtiarkan pelayanan dan pengaturan yang berisi sbb..

No.	Masalah	Lokasi	Ikhtiar yang dilakukan	Petugas Waktu Keterangan
1	2	3	4	5

bab III. cara penyusunan suatu programa

A. PROSEDUR PENYUSUNAN SUATU PROGRAM

Programa Penyuluhan Pertanian disusun bersama antara petugas pemerintah dan kontaktani-nelayan serta pemuka masyarakat tani-nelayan lainnya, sehingga programa yang benar-benar berdasarkan kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Programa Penyuluhan Pertanian yang disusun secara partisipatif memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Programa dapat disusun lebih sesuai dengan keperluan sasaran (petani-nelayan dan keluarganya), sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna.
2. Akan lebih mudah dalam menarik dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakannya.
3. Berkembangnya rasa tanggungjawab dan sikap positif terhadap pembangunan.



*Petugas bersama-
merencanakan ke-
giatan yang akan dilakukan.*

4. Berkembangnya sikap hidup yang berlandaskan azas demokrasi.



Dengan cara penyusunan programa yang dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat, kita tidak hanya melakukan sesuatu untuk rakyat tapi sudah lebih dari itu, yaitu melakukan sesuatu bersama rakyat. Dengan cara kerja seperti ini maka azas demokrasi telah kita terapkan, yang akan merupakan dasar untuk mendorong rakyat dapat membantu dirinya sendiri.

B. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SUATU PROGRAMA

Tahapan-tahapan penyusunan suatu programa yang telah diuraikan di Bab II sebenarnya menunjukkan sebagian langkah-langkah dalam cara penyusunan programa.

Langkah-langkah selengkapnya adalah sebagai berikut:

Langkah I : Menyelesaikan tahapan I, yaitu pengumpulan data dan informasi (kebijaksanaan pemerintah, wilayah kerja, petani-nelayan dan usahatani-nelayannya) pengolahan dan analisa data sehingga didapat rumusan keadaan.

Langkah II : Menyelesaikan tahapan II dan III yaitu, penetapan tujuan dan masalah. Dalam langkah kedua ini rumusan-rumusan keadaan, tujuan dan masalah dibuat secara tertulis sebagai konsep pertama.

Langkah III : Menyelenggarakan pertemuan dengan kontak-tani-nelayan, Wanita Tani-Nelayan, Taruna Tani-Nelayan dan tokoh masyarakat tani lainnya untuk memeriksa kembali dan menyempurnakan rumusan keadaan, tujuan dan masalah yang telah ditetapkan serta mengumpulkan saran-saran tentang CARA MENCAPAI TUJUAN.



Langkah IV : Menyusun konsep program yang lengkap yang meliputi rumusan keadaan, tujuan, salah dan CARA MENCAPAI TUJUAN.

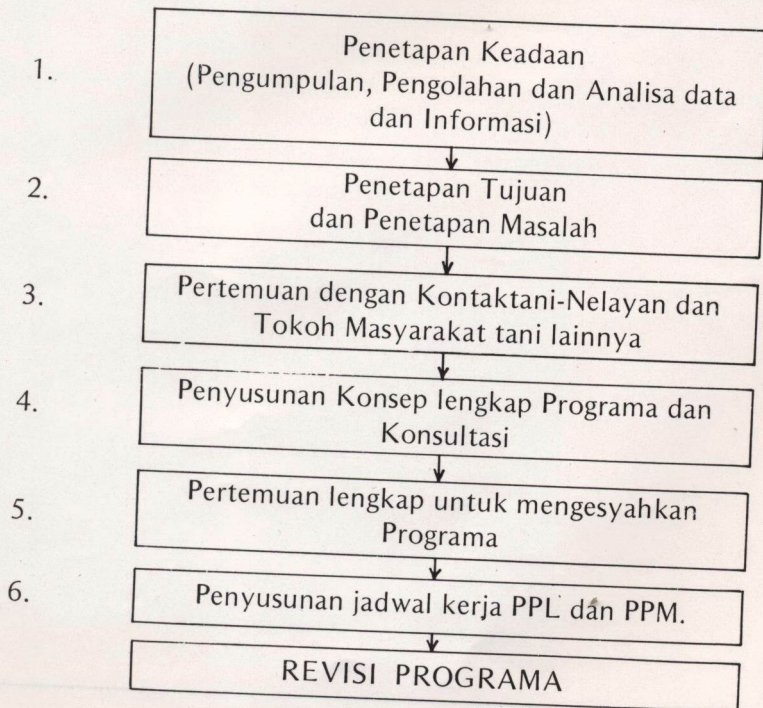
Langkah V : Mengadakan pertemuan lengkap untuk mendapatkan konsensus program, sehingga program tersebut dapat diakui, disepakati, diterima bersama sebagai program WK yang bersangkutan.
Pertemuan diikuti baik oleh pihak masyarakat (kontak-tani-nelayan, pengurus KUD,

pengurus Organisasi tani-nelayan lainnya) maupun oleh pihak pemerintah (Lurah, Camat, Dinas-Dinas).

Langkah VI : Menyelenggarakan pertemuan untuk menyusun jadwal kegiatan PPM dan PPL dengan berpegang kepada PROGRAM yang telah disahkan bersama.

Langkah VII : Revisi Program. Selama Program dilaksanakan, perbaikan atau revisi bisa dilakukan apabila ternyata terdapat ketidakcocokan. Revisi ini harus dilakukan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan secara tertulis rumusan revisinya disampaikan kepada mereka.

Secara skematis urutannya dapat kita gambarkan sebagai berikut:

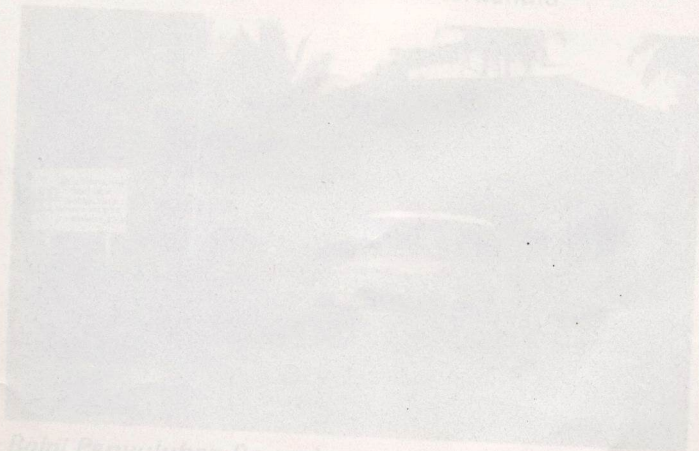


mulai pada bulan Januari.

I. Pendahuluan

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN (PPPP) di tingkat Kabupaten

2. Sejak tahun 1978 telah dipikirkan bahwa rencana kerja kegiatan penyuluhan di tingkat kabupaten perlu dituangkan dalam suatu program penyuluhan pertanian yang harus disusun setiap tahun di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian. Program Penyuluhan pertanian di tingkat BPP merupakan "kurikulum" dalam proses penyuluhan pertanian di tingkat lapangan. Pedoman teknis penyusunan program penyuluhan di BPP sudah diterbitkan terdahulu.



Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat disusunnya Program Penyuluhan Pertanian.

Programa Penyuluhan Pertanian disusun setiap tahun sekali.
Sebagai acuan waktu penyusunan kira-kira dilakukan 3
(tiga) bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Kira-kira di-
mulai pada bulan Januari.

PEDOMAN PENYUSUNAN
PROGRAMA PENYELENGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN (PPPP)
di tingkat Kabupaten

I. Pendahuluan

1. Pada hakekatnya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat lapangan merupakan kegiatan mengajar dan menggerakkan petani-nelayan, agar mereka mau dan mampu menerapkan berbagai teknologi yang dianjurkan. Dalam mengorganisasi kegiatan belajar-mengajar tentunya diperlukan suatu rencana kerja, yang harus disusun oleh penyuluh pertanian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang dihadapi.
2. Sejak tahun 1978 telah dipikirkan bahwa rencana kerja kegiatan penyuluhan di tingkat lapangan perlu dituangkan dalam suatu program penyuluhan pertanian, yang harus disusun setiap tahun di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian. Program Penyuluhan pertanian di tingkat BPP merupakan "kurikulum" dalam proses penyuluhan pertanian di tingkat lapangan. Pedoman teknis penyusunan program penyuluhan di BPP sudah diterbitkan terdahulu.



Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat disusunnnya Program Penyuluhan Pertanian.

3. Kelancaran pelaksanaan program penyuluhan pertanian disetiap WKBPP, dipengaruhi oleh pengaturan, pelayanan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Agar hal itu dapat tercapai di setiap Kabupaten, perlu ada suatu rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyeluruh dan meliputi seluruh WKBPP.

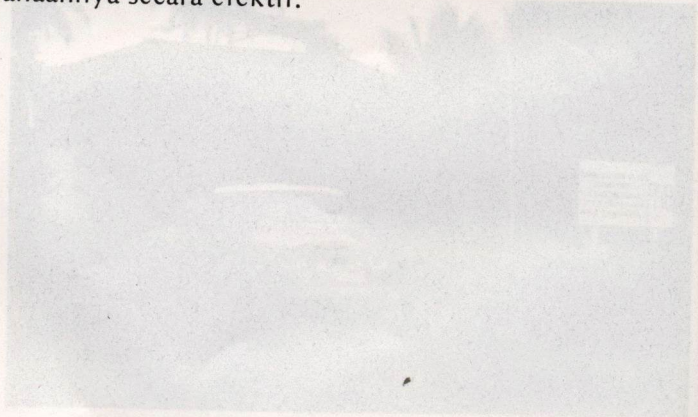
4. Dalam kegiatan pembangunan pertanian, setiap Kabupaten mempunyai fungsi penyelenggaraan. Yang dimaksud penyelenggaraan pembangunan pertanian, yaitu:

1. Perencanaan antar pelaksana;
2. Koordinasi berbagai unsur pembangunan pertanian;
3. Evaluasi antar pelaksanaan;
4. Keterkaitan dengan program lain.

Dengan demikian bukan saja terlibat dalam mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, tetapi juga dukungan dalam pengaturan pelayanan untuk melancarkan proses terjadinya penyuluhan.

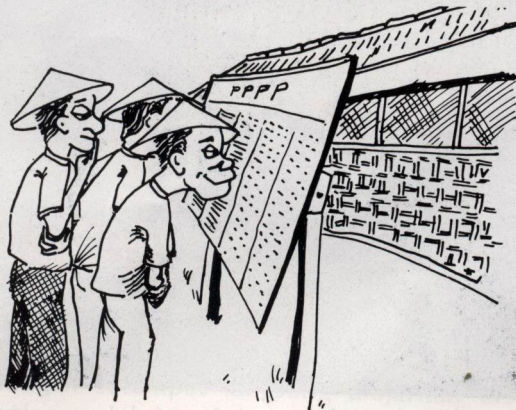
5. PPPP dimaksudkan agar terdapat keputusan dan kesatuan gerak dan langkah penyuluhan pertanian dari semua dinas lingkup pertanian untuk membina para petani-nelayan.

PPPP dipakai sebagai patokan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian di WKBPP dan mendukung pelaksanaannya secara efektif.



II. Apa Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (PPPP) itu ?

1. Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (PPPP), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana penyelenggaraan keseluruhan program pembangunan pertanian. Pada hakekatnya merupakan keputusan mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di bidang penyuluhan pertanian, sebagai upaya untuk mencapai tujuan program pembangunan pertanian yang telah dijabarkan menjadi sasaran atau proyeksi-proyeksi musiman, tahunan, atau lima tahunan. PPPP disusun setiap tahun, sesuai dengan penyusunan program penyuluhan pertanian di BPP. Dengan demikian pengertian PPPP adalah: "Suatu keputusan mengenai serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sebagai pegangan tertulis dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang merupakan bagian dari program pembangunan pertanian di wilayah tertentu".

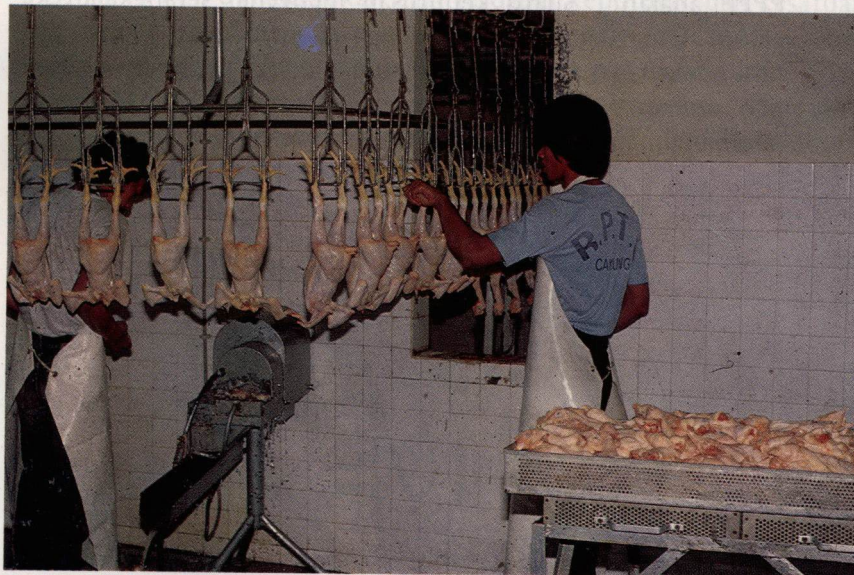


2. PPPP di tingkat Kabupaten harus merupakan upaya pelaksanaan program pembangunan pertanian di setiap Kabupaten, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Peningkatan produksi (tanaman pangan, tanaman perikanan, peternakan, perikanan), melalui penerapan sapta usaha.
 - b. Peningkatan pendapatan petani-nelayan.
 - c. Peningkatan kesejahteraan keluarga tani-nelayan.

Kegiatan-kegiatan tersebut di setiap Kabupaten dapat berbeda, tergantung pada petani dan prioritas Kabupaten setempat.

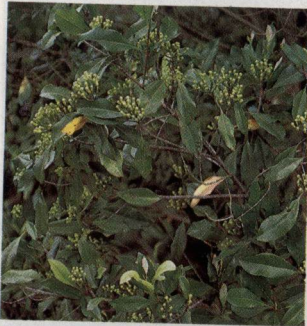
Adapun kegiatan penyuluhan pertanian yang direncanakan dalam PPPP, harus merupakan upaya untuk:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan menuju terwujudnya swa-sembada pangan (karbohidrat, protein, vitamin dan mineral).



Ayam potong sebagai sumber protein

- b. Meningkatkan produksi pertanian penghasil devisa dan penunjang industri dalam negeri, serta mengurangi import komoditi pertanian yang memerlukan devisa.



Salah satu komoditi untuk menunjang industri dalam negeri.

- c. Menciptakan kesempatan lapangan kerja di pedesaan.

Potensi daerah/wilayah setempat, kemampuan petani beserta keluarganya dan kondisi lingkungan setempat ada yang sama, hampir sama dan ada juga yang berbeda satu sama lain. Karena itu perencanaan harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga apapun yang direncanakan harus berada dalam jangkauan kemampuan penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada, baik kelembagaan penyuluh pertanian maupun kelembagaan petani.

3. Ruang lingkup PPPP mencakup antara lain:

- a. **Pengajaran teknologi maju yang tepat guna.**

Teknologi maju yang diperlukan untuk mencapai tujuan program-program pembangunan pertanian atau untuk mencapai sasaran/proyeksi yang ingin dicapai, pada dasarnya perlu dipertimbangkan dan dirumuskan.

Teknologi maju yang kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan setempat masih diragukan, diintrodusir dan observasi melalui pengujian dan dikaji terapan oleh kontak-tani yang bekerjasama dengan penyuluh pertanian.

Teknologi maju yang sudah sesuai dengan kondisi lingkungan setempat langsung diajarkan oleh penyuluh pertanian melalui berbagai metode penyuluhan pertanian yang tepat.



Demonstrasi cara menggunakan alat di lapangan

b. Peningkatan kemampuan penyuluh pertanian.

Penyuluh pertanian dalam suasana apapun harus didorong untuk mempunyai kemampuan yang lebih dari petani beserta keluarganya.

c. Peningkatan kemampuan kontaktani-nelayan.

Untuk meningkatkan daya jangkau penyuluh pertanian yang jumlahnya terbatas, perlu direncanakan secara seksama peningkatan kemampuan khusus yang mutlak diperlukan kontaktani-nelayan, antara lain dalam hal:

1. Kepemimpinan dan kewiraswastaan
2. Mengorganisasikan kelompok tani-nelayan
3. Menghasilkan keputusan/kesepakatan, berbagai hasil musyawarah kontaktani-nelayan dan kelompoknya.
4. Mendayagunakan dan menimba kemudahan-kemudahan yang disediakan pemerintah dan swasta, melalui temu karya, temu usaha, temu wicara dan mimbar sarasehan.
5. Mengembangkan swakarya, swadaya dan prakarsa.

III. Bagaimana Menyusun PPPP

1. PPPP disusun oleh FKPP II dengan mengikutsertakan Kontaktani-Nelayan Andalan (KTNA) tingkat Kabupaten dan petugas instansi yang ada kaitannya dengan penyuluhan pertanian. PPPP ini disampaikan kepada pemerintah daerah, dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaannya, baik di tingkat Kabupaten, Propinsi dan atau Kanwil Deptan.

2. Langkah-langkah penyusunan PPPP adalah sebagai berikut:

- Pertama : Pengumpulan, pengolahan dan analisa data keadaan.
- Kedua : Penulisan konsep oleh team pelaksana
- Ketiga : Rapat koordinasi untuk mengkaji konsep
- Keempat : Perbaikan konsep
- Kelima : Rapat pengesahan
- Keenam : Revisi setelah DIK dan DIP turun.

3. Pengesahan PPPP harus selesai paling lambat akhir triwulan III pada setiap tahun anggaran.

Rancangan umum (outline) PPPP adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan : berisi gambaran penyuluhan pertanian yang menyeluruh, proses penyusunan, isi materi, petugas dan waktu (life time) secara singkat.

B. Keadaan : berisi data potensi yang erat kaitannya dengan penyuluhan pertanian yang tercantum dalam program pembangunan pertanian baik tingkat Pusat, Propinsi, maupun Kabupaten.

C. Tujuan : berisi hal-hal yang perlu dicapai dan



PERPUST

ADAN PENDIDIKAN, LATIHAN DAN

37
P